BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bersifat universal. Peraturan-peraturannya mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip ini tersirat dari firman Allah :

ما فرطنا في الكتب من شئ

"Tidaklah kami alpakan sesuatupun didalam Al-Kitab" - (Al-Qur'an, 6 : 38).

Dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwa norma-norma hukum dalam Islam mencakup semua urusan kenegaraan termasuk di dalamnya sistem pemerintahannya (Dr. Abdul Karim Zaidan,- 1987 : 162). Sebagaimana yang terkandung dari makna firman Allah yang lain :

وامرهم شورى بينهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (Al-Qur'an, 42 : 38).

Berkaitan dengan lafadz "Amr" dalam ayat ini, Muhammad Asad, menjelaskan :

"Perkataan "Amr" dalam ayat diatas menunjuk kepada - arti semua urusan yang bersifat kemasyarakatan dan karena itu juga mencakup tata cara penyelenggaraan pemerintahan"(Muhammad Asad, 1990 b : 82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan urusan kenegaraan berikut sistem-pemerintahannya, Islam telah meletakkan prinsip dasarnya. Menurut Abul A'la Al-Maududi, bahwa dalam suatu negara Islam, pemerintah dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan musyawarah. Hak politik, yaitu tanggung jawab urusan kenegaraan telah dijanjikan kepada segenap - masyarakat muslim, bukan hanya terbatas kepada perseorangan maupun sekelomok orang (Abul A'la Al-Maududi, 1990 a : 94), sebagaimana firman Allah :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا
الصلحت ليستخلفنهم فى الارض

"Allah telah menjanjikan kepadaorang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia akan memberikan kekhalifahan kepada mereka dimuka bumi (Al-Qur'an, 24 :55).

Ayat ini mengandung dua prinsip konstitusional (Abul A'la Al-Maududi, 1990 a : 28).

1. Negara Islam adalah negara perwakilan (kekhalifahan).
2. Kekuasaan "kekhalifahan" adalah hak semua masyarakat - muslim.

Hak semua masyarakat ini oleh Abul A'la Al-Maududi dijelaskan :

"Menjadi hak setiap muslim untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung - maupun melalui seorang wakil yang dipilihnya bersama-kaum muslimin lainnya"(Abul A'la Al-Maududi, 1985:69)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sahnya pemerintahan Islam yang harus dipatuhi oleh masyarakat muslim dengan cara yang ringkas-tegas-telah ditetapkan dalam Al-Qur'an :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولى الامر منكم

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu" (Al-Qur'an,-4 : 59)

Dari ayat ini dapat ditarik beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Muhammad Asad, 1985 : 68), yaitu :

1. Pemerintahan Islam wajib melaksanakan hukum syara' di seluruh wilayah hukumnya.
2. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan jiwa syari'at.
3. Persetujuan masyarakat adalah satu unsur disamping kewajiban mematuhi pemerintahan Islam yang sah selama peraturan-peraturannya tidak bertentanagan dengan prinsip umum syari'at.
4. Azas persetujuan masyarakat mengandung arti pemerintahan harus dibentuk berdasarkan pilihan bebas dari seluruh masyarakat muslim.

Dari prinsip-prinsip dasar diatas maka dapat diambil suatu azas penting dalam mengelola urusan kenegaraan-dengan cara yang benar. Azas yang di maksud adalah azas-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"persetujuan rakyat" yang dalamnya terkandung azas "pemilihan". Azas persetujuan rakyat ya ng didahukui oleh azas pemilihan itu dapatdipahami dari makna yang terkandung da lam firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain :

وامرهم شورى بينهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (Al-Qur'an, 42 : 38)

وشاورهم في الامر

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai - urusan" (Al-Qur'an, 3 : 159)

واولي الامر منكم

"Dan Ulil Amri diantara kamu sekalian" (Al-Qur'an, 4 : 59)

Lafadz "musya warah diantara mereka" atau "bermu - syawarahlah dengan mereka" dalam ayat diatas menunjukkan- bahwa bermusyawarah diantara masyarakat muslim dalam sega la aspek kehidupan adalah penting (Dr. Muhammad Abdul Ka- dir Abu Faris, 1987 :99). Penerapannya adalah keharusan - merupakan suatu ketaatan kepadanya harus dihormati oleh - pemerintah dan masyarakat muslim sepanjang masa (Abdurrah man Azzam, 1990 b : 48).

Oleh karena bermusyawarah merupakan perintah wajib maka dalam negara Islam, pemerintahan harus di bentuk - dan di selenggarakan secara musyawa rah dengan rakyat- (Abul A'la Al-Maududi, 1990 a ; 208). Karenanya, da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan ketata negaraan dan kehidupan sosial harus bersumber pada kesepakatan masyarakat (Muhammad Asad, 1990 a : 79). Demikian pula struktur negara harus sedemikian rupa sehingga rakyat bebas mengeluarkan pendapat mereka (Abul A'la Al-Maududi, 1990 a : 208).

Namun jelas tidak mungkin mengumpulkan seluruh ummat dalam satu forum persidangan, maka tidak bisa tidak harus ditunjuk beberapa orang tertentu untuk mewakili ummat dalam mengambil keputusan. Pada masyarakat majemuk dan kompleks seperti sekarang ini, pemahaman masyarakat dan prinsip-prinsip permusyawaratan tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan jalan pemilihan umum. Karena hanya cara itulah satu-satunya sarana yang memungkinkan bagi ditampilkannya para calon untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Pemahaman ini tersimpul dari maksud yang dikandung dari lafadz "diantara mereka" atau "diantara kamu sekalian" dalam ayat diatas.

Muhammad Asad menafsirkan lafadz tersebut sebagai isyarat yang menunjuk kepada seluruh masyarakat muslim dan karenanya Majelis Permusyawaratan harus mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, baik pria maupun wanita. Sifat representatif seperti tidak dapat diwujud-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kecuali dengan jalan pemilihan umum yang bebas.

> "Artinya; para anggota Majlis Permusyawaratan itu harus dipilih melalui kebebasan hak (memilih) yang seluas mungkin diberikan kepada masyarakat, baik pria maupun wanita, berdasarkan hak suara mereka"(Muhammad Asad, 1985 :83).

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam realitas politik di Indonesia perhatian pemerintah terhadap hak politik bagi warga negara juga nampak. Sebagai negara hukum Indonesia memberi jaminan secara konstitutif terhadap hak-hak asasi manusia (Dahlan Thaib, SH, 1991 :89), termasuk pula hak-hak politik.

Hak-hak politik ini juga diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 28 UUD 1945 (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1986: 2). Dari pasal itu dapat ditarik pengertian tentang adanya hak-hak dalapangan politik. Setiap warga negara berhak dan dijamin dengan bebas mengadakan perserikatan dan berkumpul ; bebas untk menjadi anggota salah satu kekuatan politik yang disahkan dan behak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya pengrauh, tekanan dan paksaan baik langsung maupun tak langsung (Dahlan Thaib, SH, 1991 : 100).

Berdasarkan hasil penelitian sementara diatas, dapat diasumsikan bahwadi negara Indonesia merdeka sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil mereka yang dipilih melalui pemilihan umum di DPR,- merupakan sistem yang Islami (H. Munawir Sjadzali, MA, 19 91 : 209). Dengan demikian, maka dapat diambil dugaan se mentara bahwa hak-hak politik warga negara Indonesia da lam pemilu untuk sementara adalah sesuai dengan norma-nor ma tentang hak-hak politik dalam hukum Islam. Dengan ini akan menjadi benar jika dalam penelitian dapat dibuktikan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan (penjabaran) nya disemua peraturan pelaksanaan yang menyangkut pemili- han umum dan pengangkatan wakil-wakil rakyat di DPR.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peraturan pe laksanaan tentang pemilu di Indonesia sebagai perwujudan- hak-hak dalam hukum Islam, khususnya hak memilih dan dipi lih, diperlukan penelitian yang mendalam tentang masalah- tersebut.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa masa- lah pokok yang terdapat dalam latar belakang masalah, ada lah : hak ikut serta dalam pemerintahan dan badan-badan - perwakilan rakyat, dengan mempergunakan hak pilih, baik- hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. agar menjadi je las perlu di kaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia- yang beragama Islam, dalam wawasan mereka tentunya -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada hukum Islam, dengan demikian rumusan masalahnya menjadi : "Tinjauan hukum Islam terhadap hak memilih dan hak dipilih di Indonesia".

C. Pembatasan masalah

Masalah : "Tinjauan hukum Islam terhadap hak memilih dan hak dipilih di Indonesia", masih bersifat luas dan umum. Untuk itu, masih diperlukan pembatasan yaitu ; dari segi yuridis normatifnya saja.

Dengan pembatasan demikian maka rumusan masalahnya adalah : "Tinjauan hukum Islam terhadap norma-norma tentang hak memilih dan hak dipilih di Indonesia".

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan:

a. Apa dan bagaimana norma-norma tentang hak memilih dan hak dipilih di Indonesia ?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap norma-norma tentang hak memilih dan hak dipilih tersebut ?

E. Tujuan studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

a. Mengetahui norma-norma tentang hak memilih dan hak di pilih dalam pemilihan umum di Indonesia.

b. Harus mengetahui bagaimana norma-norma tersebut menurut pandangan Islam.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, minimal dua hal, yaitu :

i. Dari segi teoritis dapat dijadikan perbendaharaan ilmu pengetahuan, diantaranya sebagai landasan teoritis bagi para peneliti selanjutnya yang menyangkut masalah-masalah tentang hak-hak politik maupun hak-hak azasi-pada umumnya, baik sebagai bahan perbandingan maupun-kerangka dasar dalam menganalisis pelaksanaan norma - norma tentang hak pemilih ini dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

2. Dari segi terapan dapat dijadikan bahan pertimbangan-dalam menyusun Undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan pemilihan umum yang setiap saat selalu diadakan perbaikan-perbaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu, disamping juga sebagai bahan dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang akhir-akhir ini dilaksanakan pemerintah Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi

1. Data yang akan dihimpun.

Data yang diperlukan dalam pemelitian ini secara-global adalah :

a. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila di Indonesia.

b. Norma-norma tentang hak pilih di Indonesia.

c. Penjabaran hak pilih dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik dalam sistem pemilihan umum maupun sistem perwakilan rakyatnya.

2. Sumber data.

Sumber data.

a. Buku-buku yang berhubungan dengan masalah pemilihan - di Indonesia.

- Undang-undang no 15 tahun 1969 tentang pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang no 1 tahun 1985.
- Peraturan pemerintah no 35 tahun 1985 tentang peraturan peleksanaan pemilu.
- Drs. C.S.T. Kansil, SH, Memilih dan dipilih, Prad nya Paramita, Jakarta, 1986.
- Drs. C.S.T. Kansil, SH, Memahami pemilihan umum - dan referandum, IND. HILL-CO, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- H. Abu Bakar Busro, SH, dan Abu Daud Busroh, SH, - Hukum tata negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bintan R. Saragih, SH, Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Bintan R. Saragih, SH, Sistem pemerintahan dan Lembaga perwakilan di Indonesia, Perintis Press, Jakarta, 1985.
- Drs. Arbisanit, Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang keterkaitan organisasi masyarakat, partisipasi politik, pertumbuhan hukum dan hak azasi, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Dahlan Thaib, SH, Pancasila, Yuridis Ketatanegaraan Unit penerbitan dan percetakan AMP, Yogyakarta, - 1991.
- Mh. Isnaini, MPR-DPR : Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila, Idyu, Jakarta, 1982.
- Drs. A.W. Wijaya, Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila, Alumni, Bandung, 1984.

b.Buku-buku literatur yang berhubungan dengan hukum Islam

- Abul A'la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Mizan, Bandung, 1988.
- Abul A'la Al-Maududi, Hak Azasi Manusia Dalam Islam Pustaka, Bandung, 1985.
- Abul A'la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, Mizan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1990.

- Dr. Abdul Karim Zaidan, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Hakekat Sistem Politik Islam, PLP2M, Yogyakarta, 1987.
- Muhammad Asad, Sistem Pemerintahan Islam, Pustaka, Bandung, 1985.
- Prof. HM. Daud Ali, SH, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Dr. Fathi Osman, Negara Dalam Sunnah Rasulullah, - Kalam Mulia, Jakarta, 1990.
- Prof. Dr. M. Yusuf Musa, Politik Dan Negaram Dalam Islam, Pustaka, LSI, Yogyakarta, 1991.
- Salim Azzam, Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, Mizan, Bandung, 1993.
- H. Munawir Sjadzali, MA. Islam Dan Tata Negara, Pt, Universitas Indonesia, UI - Press, 1990.
- Muhammad S. Elwa, Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

3. Tehnik penggalian data.

Dari sumber data pokok yang dijadikan bahan acuan dan landasan teori diatas, dapat diketahui bahwa studi ini seluruh data yang diperlukan bersumber pada literatur-literatur yang membahas masalah-masalah yang -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan erat dengan studi ini. Dengan demikian teh-nik penggalian data yang dipakai dalam studi ini ada-lahstudi kepustakaan atau telaah pustaka.

H. Metode analisis data.

Data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, direncanakan dianalisis secara kwantitatif, dengan tahap-tahap sbb.

1. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu pemeriksa-an kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, rele-vansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistima-tiskan data-data yang diperoleh, dalam kerangka papa-ran yang sudah direncanakan sebelumnya guna menghasil kan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi yakni nor ma hak pilih dan penjabarannya dalam penyelenggaraan-pemerintahan di Indonesia.
3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan ter hadap hasil pengorganisasian data dengan mengunakan - dalil, kaidah teori dsb, sehingga diperoleh kesimpu-lan-kesimpulan tertentu dengan mengunakan beberapa - metode antara lain :

a. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang ada, baik norma hak pilih dan penja barannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di In donesia maupun norma hak pilih dalam Islam, khusus nya penjabarannya dalam sistem pemilihan umum dan lembaga perwakilan.

b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori ,- dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum- kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui hal- hal yang khusus, yakni dapat diketahui bahwa anta- ra norma hak pilih di Indonesia dan hak pilih dalam Islam mempunyai aturan tersendiri.

c. Metode komparatif, yaitu meneliti hubungan beber- pa data yang diperoleh, kemudian membanding-banding kan antara kedua data tersebut, khususnya dari se gi sistem pemilihan umum dan sistem perwakilan (- lembaga perwakilan), kemudian dirumuskan kesimpu- lannya.

I. Sistematika pembahasan.

Untuk mempermudah dan memahami dalam mempelajari- apa yang ada dalam skripsi ini maka sistematikanya diba- gi menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari beber- pa sub bab. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat di dides kripsikan sbb :

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memberi -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran secara global proses mencari kebenaran yang ber kaitan dengan studi ini, yaitu " apa ? "; yang meliputi- permasala han dan tujuan studi; unsur " bagaimana ? "; - yang meliputi metode, pengumpulan dan analisis data; dan unsur " untuk apa ? "; ya ng meliputi kegunaan studi.

Bab kedua, bab ini berisi tentang awal pembahasan yakni, Tinjauan umum tentang teori-teori yang akan digunakan untuk pembahasan obyek penelitian, meliputi :

A. Tinjauan umum tentang pemerintahan dalam Islam, yang- meliputi konsep pemerintahan dalam Islam, prinsip-prin sip dasarnya dan tujuannya .
B. Hal-hal yang berkaitan dengan hak pilih dan penjabar - rannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam, khususnya tentang sistem pemilihan dan lembaga perwa- kilan.

Bab ini merupakan landasan teoritis yang dapat dijadikan landasan dan pendekatan untuk melakukan analisis bab be rikutnya.

Bab ketiga, dalam bab ini dibahas tentang obyek - pembahasan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma hak pilih dan penjabarannya dalam penyelenggaraan pemerinta- han di Indonesia, meliputi :

A. Tinjauan umum sistem pemerintahan di Indonesia, yang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi sistem pemerintahan demokrasi dan sis tem pemerintahan di Indonesia, ya ng menganut sistem-demokrasi Pancasila.

B. Hal-hal yang berkaitan dengan hak pilih dan penjabaran nya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,- yang meliputi sistem pemilihan umum dan lembaga perwa kilan rakyat.

Bab keempat, bab ini merupakan penyajian data dan juga sekaligus analisisnya, meliputi :

A. Analisis dari segi sistem pemilihan umumnya.

B. Analisis dari segi sistem perwakilan rakyatnya.

Bab kelima, bab ini adalah kesimpulan sebagai ha-sil akhir yang ditrik dari pembahasan dalam bab keempat-yang menjadi jawaban permasalahan. Pengalaman serta ke-san-kesan selama penelitian dapat dijadikan saran kepada pembaca dalam bab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id